



DR. MUH KHAMDAN

Widyaiswara Badiklat Kumham Jateng

18 Maret 2024



PENGANTAR ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Pelatihan Administrasi Kepegawaian

2021/06/26 07:40

Profil Pemateri

Lahir di Jepara, Jawa Tengah

PENDIDIKAN

1. S1 IAIN Kudus, Pendidikan Agama Islam (2007)
2. S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Studi Perdamaian (2015)
3. S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Studi Perdamaian (2021)

PENGALAMAN

1. Widyaiswara Kemenkumham (IV/b)
2. Pengajar (Dosen dan Pendidik)
3. Paradigma Institute (Media)
4. Sekretaris Dewan Kota Semarang, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)

PUBLIKASI

1. Pesantren di Dalam Penjara (2012)
2. Negosiasi Hukum dan Politik (2013)
3. HAM bagi Narapidana (2014)
4. Bina Damai Terorisme (2015)
5. Politik Identitas dan Kontestasi Kuasa (2022)



Hp. 081326193918

Email: khamdanwi@gmail.com

- Tjitra Mas Residence Blok F2 No. 20-21 Kalisuren 4/1 Tajurhalang Bogor
- Jl. Sapta Marga II No. 182 Kel. Kembangarum 2/4 Semarang Barat – Kota Semarang



Tujuan Pembelajaran



Seseorang dalam posisi jabatan maupun pekerjaan tertentu, memiliki amanat untuk melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya melalui

KINERJA TERBAIK



Pengantar Perkembangan Kepegawaian Indonesia
Kebijakan Jenis ASN

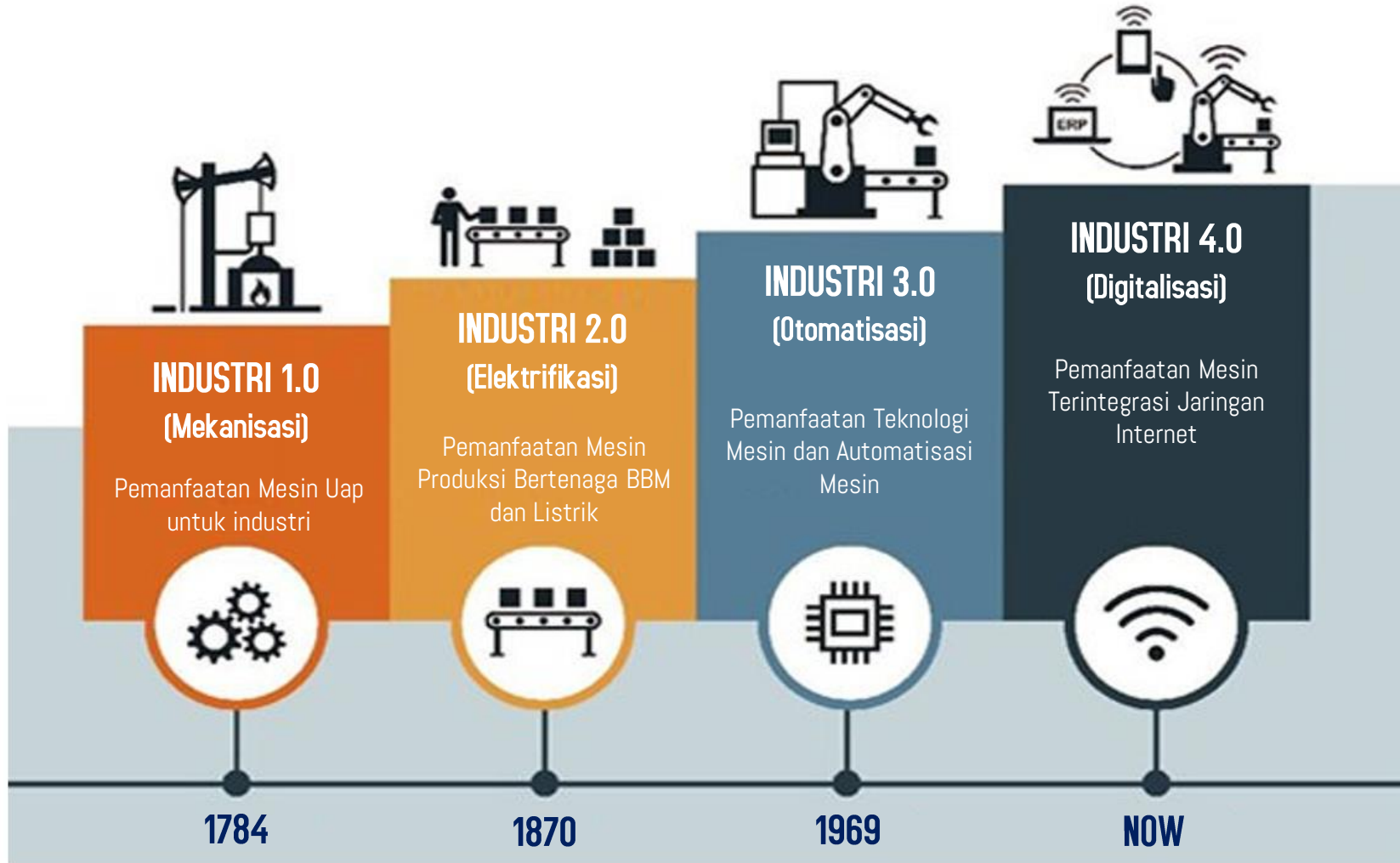


Pengantar Siklus Manajemen Kepegawaian
Siklus Manajemen dan Pengelolaan ASN

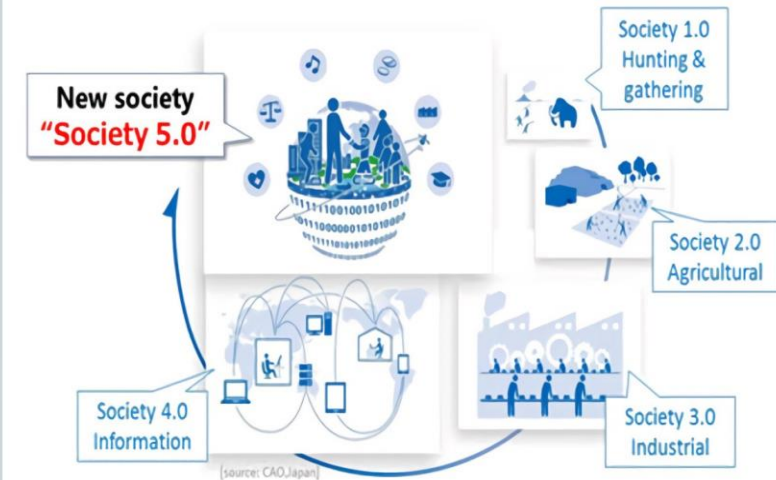


Pengantar Administrasi Kepegawaian
Pengelolaan Layanan Administrasi Kepegawaian

Pengantar; Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0



Pencapaian Masyarakat Super *Smart Society* (Society 5.0),
Memanusiakan manusia dengan teknologi sehingga perlu **KOMITMEN MUTU**



Refleksi Kondisi: Apa yang Anda Fikirkan?



HOME > BISNIS >

Ramai PNS Diganti oleh Robot AI, Ini Penjelasan Lengkap Ketua Korpri

Reporter: Antara
Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Kamis, 2 Desember 2021 12:34 WIB

0 KOMENTAR



Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah angkat bicara soal ramai pemberitaan pegawai negeri sipil (PNS) akan digantikan oleh artificial intelligence (AI) yang menggunakan mesin robot atau robot AI.

400 PNS di Jawa Barat telah diganti robot AI, begini cara kerja artificial Intelligence

Nurfathana S - 23 Desember 2021, 09:00 WIB



Ilustrasi robot AI Microsoft.* /ROBOTIC MAGAZINE/

WartaBulukumba - Manusia dan kerja memiliki fluktuasi terkait kinerja maupun spirit, maka di sanalah robot artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan menjadi pengganti.

Pada intinya, konsep AI melibatkan teknologi komputasi yang dirancang untuk membuat mesin berfungsi dengan pandangan ke depan yang meniru, dan pada akhirnya melampaui, proses berpikir manusia.

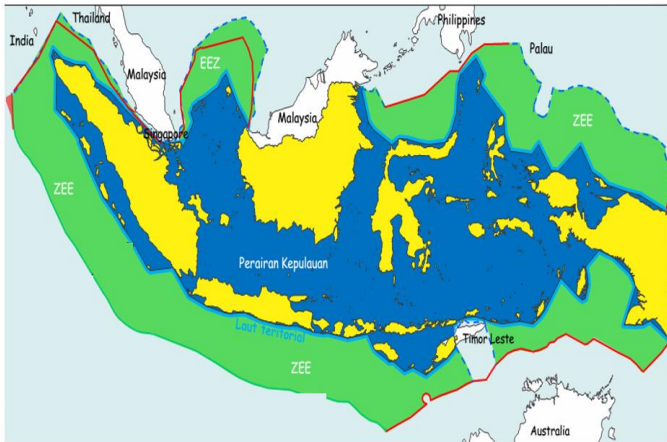
PEGAWAI
KARYAWAN
BURUH
PEKERJA



Sejarah Perkembangan PNS di Indonesia



*Perubahan Kebijakan Seiring
Berubahnya Lingkungan Strategis
Nasional*



1

pegawai negara Republik Indonesia

18 Agustus 1945 Presiden bentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Terbentuk dengan 137 anggota pada 29 Agustus 1945

2

PP 32/1950

Pembentukan Kantor Urusan Pegawai

UU 5/2014

Aparatur Sipil Negara

4

3

UU 8/1974

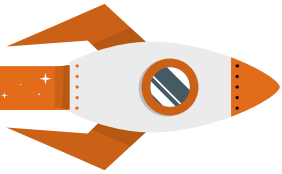
Korps Pegawai Republik Indonesia, 29 November 1971

5

UU 20/2023

Hak sama antara PNS dan PPPK

31 Oktober 2023, tidak ada istilah PNS Pusat dan PNS Daerah

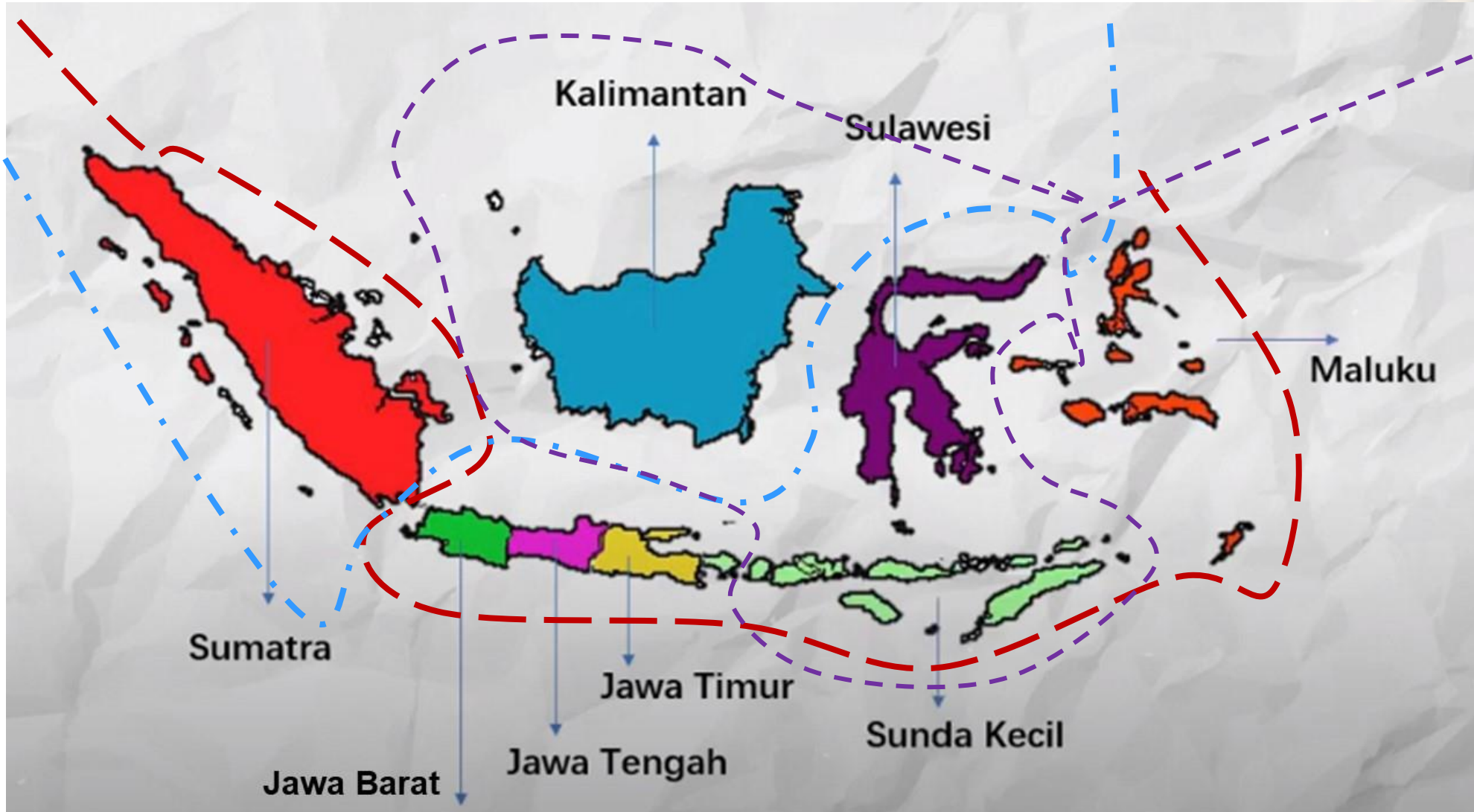


Indonesia Awal Kemerdekaan 1945

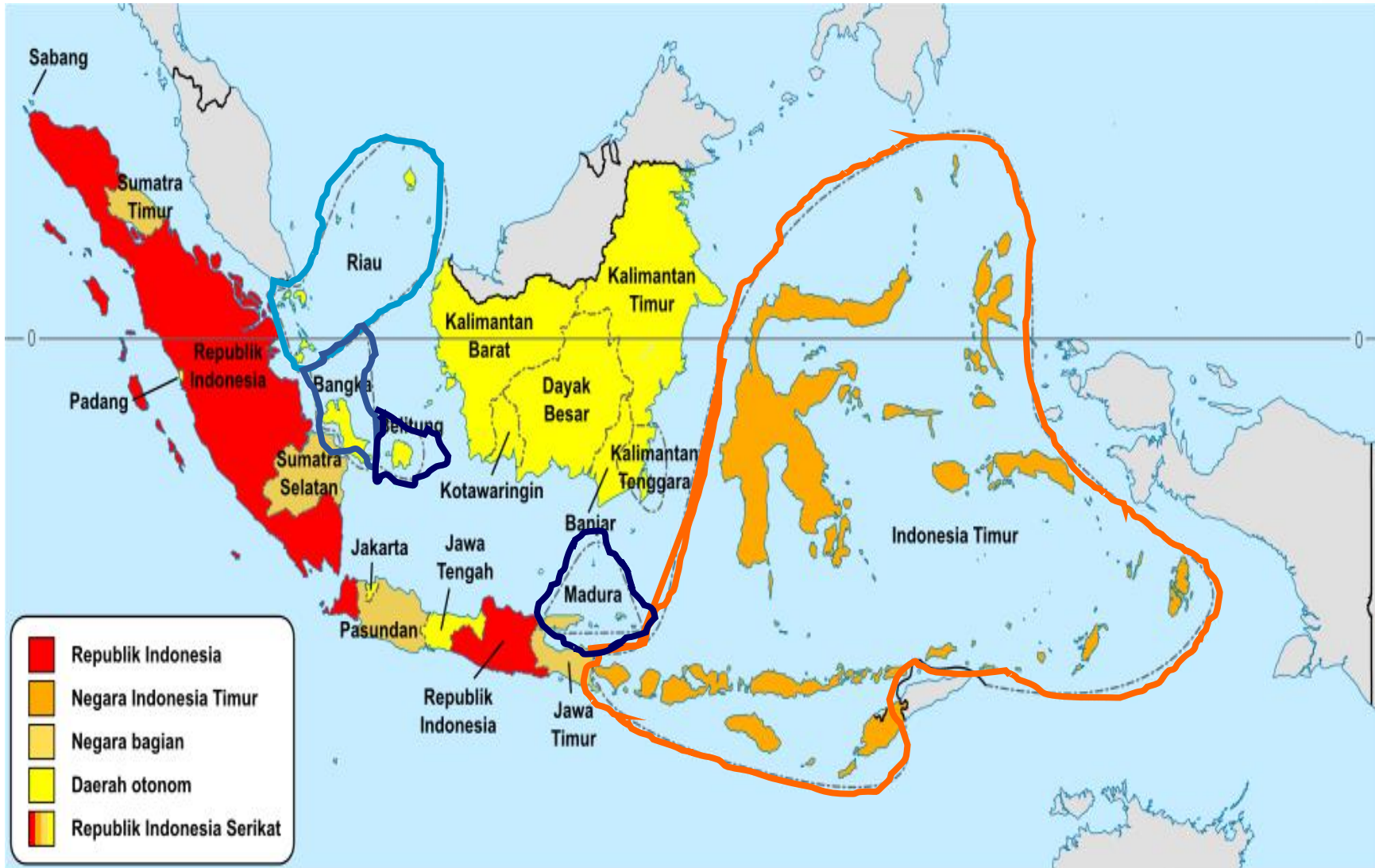


8 Provinsi Pertama
Negara Republik
Indonesia

1. Sumatera
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
5. Sunda Kecil
6. Kalimantan
7. Sulawesi
8. Maluku



Indonesia Awal Berdirinya RIS 1949



16 Negara Bagian dan 1 Wilayah Federal
Keanggotaan Republik Indonesia Serikat

1. Republik Indonesia
2. Negara Sumatera Timur
3. Negara Sumatera Selatan
4. Negara Pasundan
5. Negara Jawa Timur
6. Negara Madura
7. Negara Indonesia Timur
8. Riau
9. Bangka
10. Belitung
11. Jawa Tengah
12. DI. Borneo Barat
13. Dayak Besar
14. DI. Banjar
15. Federasi Borneo Timur
16. Borneo Tenggara

Penyerahan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949 pasca-KMB.

Penyerahan Keimigrasian pada 26 Januari 1950, dengan Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala pertama.

Indonesia Awal Berdirinya NKRI 1950



Pembubaran Keanggotaan RIS, dan “Proklamasi Kedua” Membentuk Negara Baru bernama NKRI

- Konsepsi kesatuan disampaikan M. Natsir pada 3 April 1950, di Parlemen atasnama Partai Masyumi
- Kesatuan Pemerintahan belum diiringi adanya kesatuan wilayah, karena masih dipisahkan laut-laut perairan internasional

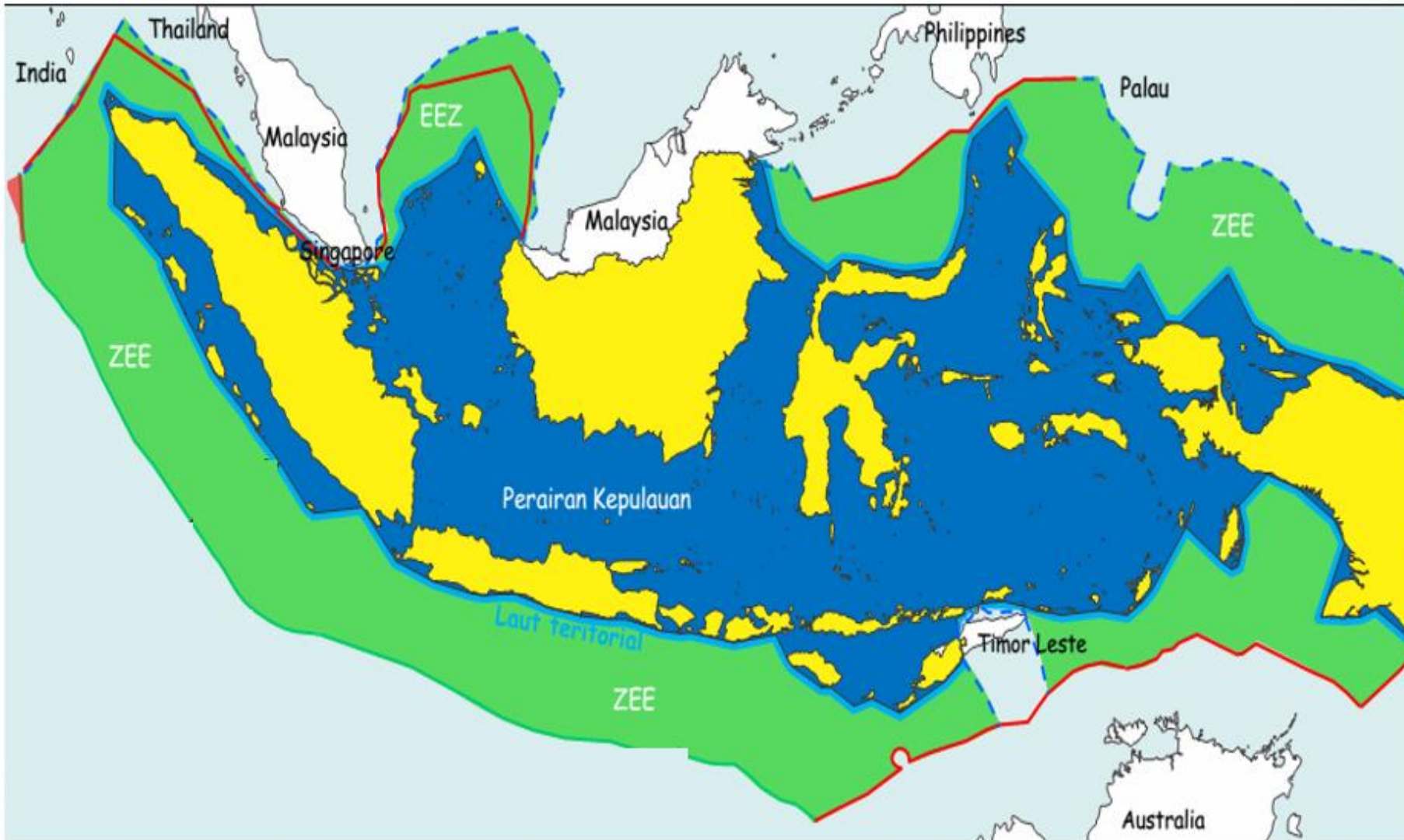
Indonesia Pasca Deklarasi Djuanda 1957



Deklarasi PM. Djuanda pada 13 Desember 1957

- Konflik Papua menjadikan konstelasi perairan internasional memanas dan berpotensi mengancam kewilayahan NKRI
- Kesatuan Pemerintahan belum diiringi adanya kesatuan wilayah, karena masih dipisahkan laut-laut perairan internasional
- Batas Perairan Indonesia diukur 12 mil dari pulau terluar NKRI

Indonesia Pasca UNCLOS 1982



Deklarasi PM. Djuanda pada 13 Desember 1957, dilanjutkan Diplomasi Kelautan Internasional

- Deklarasi Djuanda 1957 menjadikan wilayah Indonesia semakin luas sekitar 3,1 juta km persegi
- Perjuangan di UNCLOS sampai pada 1982, dengan delegasi Indonesia dipimpin Muchtar Kusumaatmadja berhasil merubah hukum laut Internasional
- Indonesia berhasil meraih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) pada 10 Desember 1982 dengan penambahan wilayah perairan seluas 200 mil dari dasar garis dasar.
- Jumlah pulau semula 8.000-an, bertambah menjadi 17.000-an

Pengantar Jenis ASN



Perubahan manajemen ASN terakhir diundangkan pada 31 Oktober 2023 dalam bentuk

UU Nomor 20 Tahun 2023.

Terdapat substansi baru:

1. Hak sama antara PNS dan PPPK
2. Skema single salary
3. Pengisian Jabatan ASN dari TNI-Polri
4. Penyederhanaan Jabatan dan Layanan Kepegawaian



TUGAS DAN PERAN ASN

Melaksanakan Kebijakan Publik
Memberikan Layanan Publik
Mempererat Persatuan dan Kesatuan NKRI

”

Agenda Transformasi Pasca-UU Baru

11



Antara PNS dan PPPK



PNS

PASAL

UU ASN

Pasal 1 Angka 3
Pasal 7

STATUS

1. Diangkat sebagai pegawai tetap
2. Memiliki NIP Nasional
3. Sebagai Pembuat Kebijakan



PPPK

PASAL

UU ASN

Pasal 1 Angka 4
Pasal 7

STATUS

1. Diangkat dengan Perjanjian Kerja
2. Dapat diberi Nomor Induk PPPK
3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan

Pada awalnya, inisiasi adanya PPPK dalam penyusunan UU ASN 2014, untuk menarik generasi ahli dan terampil Indonesia yang berdiaspora di luar negeri untuk menjadi pegawai di dalam negeri

Gambaran Diaspora Indonesia dan Birokrasi



Sastia Prama Putri, Ph.D
(ahli Bioteknologi dan
Mikrobiologi Osaka University)

Dr. Ing Hutomo Suryo Wasisto
(ahli Nanoteknologi
Technische Universitat
Braunschweig, Jerman)

Carina Citra Dewi & Indra Radiansyah
(ahli Vaksin Astra Zeneca
Univ. Oxford, Inggris)

Moorisa Tjokro
(ahli Autopilot Software
Engineer TESLA, USA)

Agustian Taufiq Asyhari
(ahli 5G dan Sistem Cloud
Univ. Cranfield, Inggris)

Intisari Manajemen ASN (6 P)



1 Perencanaan
Proses perencanaan kebutuhan pegawai

2 Perekrutan
Seleksi sesuai analisis kebutuhan dan beban kerja

3 Pengembangan
Kompetensi untuk mendukung produktivitas



4 Penilaian
Kinerja yang baik dan buruk perlu ada apresiasi

5 Promosi
Pengembangan karir dan penyegaran organisasi

6 Purnabakti
Pemberian penghargaan dan kesejahteraan

Arah Baru Pengembangan ASN



Pengembangan ASN sebagai respon untuk mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs)

SMART ASN 2024

1

8 Karakter (Nasionalisme, Wawasan Global, Networking, Hospitality, Entrepreneurship,



ROBUST ASN 2030

3

Adaptif, Tech Savvy, Eco Friendly



KOMPETITIF 2045

4

Kompetitif Global



**TERCAPAINYA
KELAS DUNIA**





DISKUSIKAN

- Lakukan analisis isu administrasi kepegawaian
- Uraikan Regulasi, Mekanisme dan Prosedur, Kendala dan Hambatan, Dokumen Dukung Terkait, dan Strategi Peningkatan
- Buat dalam Dokumen dan / atau paparan PPT
- Kirimkan ke Email: khamdanwi@gmail.com
- Nama File: Kel-Angktan_ISU

1

Perencanaan
Kebutuhan

2

Pengembangan
Kompetensi

3

Manajemen
Kinerja

4

Manajemen
Talenta

Clue Tugas Kelompok



Memastikan bahwa ada **strategi merubah** yang ditujukan untuk perbaikan atau peningkatan kinerja layanan administrasi kepegawaian



LATAR BELAKANG

Analisis isu-isu sesuai topik bahasan kelompok



LINGKUP KEGIATAN

Gambarkan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan dari topik



SUMBER DAYA

Kejelasan faktor pendukung, dan sumber daya yang dimiliki, termasuk regulasi dan prosedur



PENGEMBANGAN CORPORATE UNIVERSITY

Gambarkan strategi implementasi Kemenkumham CorpU dan layanan berbasis digital



MITIGASI RISIKO DAN PENGEMBANGAN

Gambarkan mitigasi risiko atau strategi respon atas potensi gangguan



Terima Kasih

Selamat Mengabadikan Pengetahuan, menjadi aset intelektual untuk orang lain dan generasi mendatang